



LEGAL SUMMARY

ALSA STUDY CLUB #2

ALSA LC UNHAS 2024/2025

Contact Person
Clarissa: +62 878-2214-2766
Fia : +62 899-8143-821

Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10
Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan, 90245

LEGAL SUMMARY ALSA STUDY CLUB #2 2025

Mastering Policy Brief: Writing for Impactful Recommendations

Oleh: A. Arrayyan Fadilah Pallawa

A. PENDAHULUAN

Dalam proses penyusunan kebijakan publik, tak jarang pemangku jabatan kerap kali membuat suatu kebijakan atau keputusan yang masih perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan. Sebagai contoh, pada kurun waktu tahun 2004 hingga 2014, dari sekitar 13.000 Peraturan Daerah (Perda), terdapat 4.000 Peraturan Daerah yang di antaranya ditolak oleh pemerintah pusat dikarenakan bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Menanggapi permasalahan seperti ini yang kerap kali terjadi secara berulang, maka dibutuhkan dokumen singkat yang mampu merangkum persoalan, menawarkan solusi, dan memberikan rekomendasi secara tepat sasaran dalam sebuah dokumen singkat bernama *policy brief* yang dirancang untuk menganalisis suatu kebijakan terkait secara jelas, padat, dan tepat untuk memperbaiki hal-hal khususnya kebijakan pemerintah. *Policy brief* dirancang untuk menyajikan analisis kebijakan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan atas berbagai opsi pada kebijakan kepada pembaca tertentu, misalnya praktisi maupun para pengambil keputusan.

Tujuan utama dari *policy brief* sendiri adalah memberikan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan publik secara lebih terarah. Dalam penyusunannya, *policy brief* sering kali mengintegrasikan aspek hukum, sosial, dan ekonomi untuk memberikan rekomendasi yang komprehensif. Dalam konteks hukum dan kebijakan publik, kemampuan menulis *policy brief* yang efektif sangat penting untuk memberikan rekomendasi yang berdampak kepada para pembuat kebijakan, akademisi, serta praktisi hukum. Dengan meningkatnya kompleksitas regulasi dan tantangan sosial, mahasiswa hukum perlu memiliki keterampilan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang jelas, berbasis data, serta persuasif. Oleh karena itu, penting untuk memahami konteks hukum yang melandasi kebijakan yang diusulkan agar implementasinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

serta sejalan dengan prinsip keadilan dan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berangkat dari kebutuhan di atas, jelas bahwa materi pembuatan *policy brief* secara komprehensif adalah unsur yang esensial bagi mahasiswa hukum. Oleh karena itu, maka diadakan ALSA *Legal Writing Intensive Training* x ALSA *Study Club* #2 dengan tema “*Mastering Policy Brief: Writing for Impactful Recommendations*” yang akan membahas secara menyeluruh mengenai hal mendasar yang perlu diperhatikan dalam menyusun *policy brief* yang efektif dengan beberapa pembahasan yaitu karakteristik *policy brief*, sasaran, struktur serta cara membuat *policy brief* yang efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana teknik dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam penyusunan *policy brief* yang baik dan efektif?
2. Bagaimana membuat *policy brief* yang dapat memberikan dampak dan mencapai sasaran yang dituju?

C. PEMBAHASAN

1. Teknik dan Langkah-langkah dalam Penyusunan *Policy Brief* yang Efektif

Policy Brief merupakan sebuah tulisan ringkas dan padat untuk menyampaikan hasil-hasil penelitian kepada pengambil kebijakan dengan penekanan pada relevansi penelitian terhadap kebijakan dan menawarkan rekomendasi untuk membuat atau memperbaiki kebijakan. Dalam menyusun *policy brief* diperlukan struktur yang sesuai dan tepat agar hasilnya dapat diterima dan dipahami secara baik dan efektif oleh pembaca, yaitu pemangku kepentingan. Mengacu pada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 28 Tahun 2017, terdapat beberapa prinsip penting yang didasarkan pada pedoman dalam penyusunan *policy brief*, yaitu:¹

- a) Fokus pada isu atau permasalahan kebijakan;
- b) Memiliki tujuan yang spesifik dan jelas;
- c) Memuat identifikasi data faktual yang mendukung tujuan tersebut;

¹ V Septiandika, I Sucahyo, A Rahmadi and N Fitria, 'Seminar dan Pelatihan Pada Mahasiswa Terkait Identifikasi Isu Kebijakan dan Penyusunan *Policy Brief*' (2022) 5(1) *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat* 158 <https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891>

- d) Menyajikan argumen dan penjelasan dalam bentuk narasi;
- e) Menghasilkan rekomendasi atau panduan yang dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan atau pembaca; dan
- f) Hasil dari *policy brief* adalah model tulisan yang berjumlah dua hingga empat halaman, maksimal delapan halaman.

Untuk memaksimalkan pembuatan *policy brief* penting untuk melakukan tahapan analisis kebijakan, agar dapat mempermudah proses penulisan, sebab telah dilakukan kajian mendalam yang menghasilkan hasil analisis komprehensif untuk dituangkan dalam *policy brief*. Analisis kebijakan memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, analisis ini merupakan aktivitas kognitif yang melibatkan proses belajar dan berpikir, di mana permasalahan kebijakan didefinisikan, dirumuskan, dipecahkan, serta dievaluasi secara berkelanjutan. Kedua, analisis kebijakan adalah bagian dari proses kolektif dalam pembuatan kebijakan, sehingga hasilnya mencerminkan kerja bersama yang terorganisasi. Dalam konteks ini, analisis tersebut dapat dipandang sebagai kontribusi intelektual yang bersifat kolektif terhadap penyelesaian isu kebijakan tertentu. Ketiga, analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu terapan yang mengharuskan keterlibatan berbagai pendekatan dan metode analitis. Meskipun analisis bisa saja mengikuti kebijakan yang bersifat konvensional atau didasarkan pada aturan yang telah diterima, hal itu tidak boleh diterima secara mentah-mentah tanpa pertimbangan kritis. Sebaliknya, analisis kebijakan harus bersifat reflektif, kreatif, imajinatif, dan eksploratif, sekaligus menjadi bentuk kontrol diri pada tingkat yang optimal. Keempat, analisis kebijakan erat kaitannya dengan isu-isu publik yang memberikan dampak luas terhadap masyarakat atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, meskipun fokus utamanya adalah pada kepentingan publik, analisis kebijakan juga dapat mencakup pertimbangan atas persoalan serta tindakan individual, sepanjang hal tersebut relevan dengan konteks kebijakan yang dianalisis.²

2. Cara Menyusun *Policy Brief* yang Berdampak dan Tepat Sasaran

² J Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (S Wahyudi, Y Setyorini and I Basuki eds, Media Nusa Creative 2021) 20–22.

Pembuatan *policy brief* yang efektif perlu memperhatikan beberapa hal terutama struktur atau susunan dalam menulis *policy brief* yang berfungsi sebagai kerangka dalam menyampaikan analisis secara runtut dan jelas. Penataan isi tampilan yang tersistematis dengan baik akan membantu pembaca, khususnya para pengambil kebijakan, untuk memahami inti permasalahan dan rekomendasi yang diberikan secara lebih cepat dan akurat. Sistematika penulisan tidak hanya berperan sebagai format teknis, tetapi juga sebagai strategi komunikasi yang penting dalam menyampaikan analisis kepada pembaca agar informasi yang disampaikan dapat diakses, dimengerti, dan digunakan secara efektif oleh pihak yang dituju. Oleh karena itu penting bagi penulis untuk memahami dan mengikuti sistematika penulisan secara konsisten. Berikut merupakan sistematika dari penulisan *policy brief* :³

1. Ringkasan

Ringkasan atau ringkasan eksekutif merupakan gambaran atau *overview* isi dari *policy brief* secara singkat dengan tujuan menarik pembaca untuk membaca secara keseluruhan *policy brief*. Ringkasan harus menjawab pertanyaan dasar dari *policy brief* seperti apa, mengapa, bagaimana, dan oleh siapa terkait analisis isu yang disampaikan.

2. Isu atau masalah

Tahapan pembahasan atau isu dalam suatu topik yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah keputusan, umumnya dirangkum dan difokuskan dalam bentuk satu rumusan masalah. Rumusan ini berfungsi sebagai inti dari keseluruhan diskusi, yang mengarahkan analisis dan penyusunan rekomendasi dalam proses pengambilan kebijakan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi.

3. Latar belakang masalah

Latar belakang merupakan bagian yang menyajikan fakta-fakta relevan guna menjelaskan konteks dari permasalahan yang diangkat dalam *policy brief*. Bagian ini berfungsi untuk memberikan pemahaman awal kepada pembaca mengenai situasi, kondisi, atau urgensi isu yang menjadi fokus pembahasan.

4. Pre-existing policies

³ *Op.cit*, hlm. 160.2

Kebijakan yang telah ada (pre-existing policies) adalah bagian yang merangkum permasalahan yang relevan, dengan tujuan untuk mengkaji dan mengonfirmasi kesesuaian serta relevansi kebijakan yang akan direkomendasikan. Bagian ini membantu memastikan bahwa usulan kebijakan baru tidak bertentangan dengan kebijakan sebelumnya, melainkan memperkuat atau menyempurnakannya.

5. Pilihan kebijakan

Pilihan kebijakan adalah gambaran mengenai alternatif tindakan yang dapat diambil, termasuk opsi untuk melakukan intervensi ataupun membiarkan tanpa tindakan. Umumnya, alternatif ini disajikan melalui tiga program potensial yang masing-masing menawarkan pendekatan berbeda dalam menangani isu yang diangkat.

6. Keuntungan dan kelemahan

Setiap opsi kebijakan yang ditawarkan memiliki potensi untuk menghasilkan dampak positif maupun negatif. Dengan kata lain, masing-masing alternatif kebijakan mengandung keuntungan serta kelemahan yang perlu dianalisis secara cermat sebelum diambil sebagai keputusan.

7. Rekomendasi

Rekomendasi dalam sebuah *policy brief* merupakan bagian penting yang menyajikan saran secara lebih khusus dan terstruktur. Tidak sekadar menyampaikan pendapat umum, rekomendasi dirancang untuk memberikan arahan yang jelas, praktis, dan dapat ditindaklanjuti oleh para pengambil kebijakan. Penyusunannya didasarkan pada analisis mendalam terhadap permasalahan, pertimbangan terhadap berbagai opsi kebijakan, serta evaluasi atas dampak yang mungkin ditimbulkan. Dengan demikian, rekomendasi berfungsi sebagai penutup yang menyimpulkan inti dari *policy brief* dan menawarkan solusi yang terukur serta relevan dengan konteks permasalahan yang diangkat.

Namun, sebelum melakukan analisis kebijakan dan menyusun *policy brief*, terdapat dua hal yang harus diperhatikan, yaitu minat dan bidang kepakaran dari audiens yang menjadi target pembaca, hal tersebut penting sebab *policy brief* yang dibuat harus memiliki isi yang relevan, tepat sasaran, dan memengaruhi pengambilan keputusan. Kemudian

waktu yang tepat dalam menyampaikan *policy brief*, dimana jika pemberian dilakukan pada waktu yang kurang tepat maka dapat berdampak pada momentum atau urgensi dalam pembuatan proses kebijakan.

Dalam menyusun *policy brief* yang baik serta dapat mencapai sasaran terdapat empat bagian utama yang perlu diperhatikan, yaitu ringkasan eksekutif, latar belakang dan pentingnya masalah, pernyataan yang menekankan tindakan yang harus dijalankan oleh pembaca *policy brief*, serta daftar kepustakaan yang terkini. Sehingga untuk dapat membuat *policy brief* yang komprehensif serta menarik perhatian untuk dibaca oleh pemangku keputusan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya:⁴

- a. Menyusun *policy brief* sebaiknya secara ringkas dan jelas, dengan menghindari pembahasan yang bertele-tele;
- b. Menggunakan bahasa yang lugas dan komunikatif, agar mudah dipahami oleh pembaca dari berbagai kalangan;
- c. Menghindari penyampaian informasi yang bersifat subjektif, dengan berfokus pada fakta dan analisis secara objektif;
- d. Memberikan rekomendasi yang jelas dan spesifik untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan konteks;
- e. Menggunakan hasil studi atau data yang relevan dan terpercaya sebagai dasar analisis;
- f. Menampilkan rujukan dari metodologi penulisan atau pendekatan analitis yang digunakan dalam penulisan *policy brief*;
- g. Menggabungkan data dan informasi melalui beragam teknik visual dalam penyajian yang berbeda seperti grafik, gambar, narasi, dan tabel; dan
- h. Memastikan informasi yang dimuat sesuai dengan sasaran *policy brief* itu sendiri.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, *policy brief* yang disusun tidak hanya akan bersifat informatif dan meyakinkan, tetapi juga berpotensi memberikan kontribusi nyata dalam proses pengambilan keputusan publik. *Policy brief* yang disusun dengan baik dapat menjadi tolak ukur dalam mendorong perubahan kebijakan, ketika berhasil menjangkau dan memengaruhi berbagai lapisan masyarakat serta pemangku kepentingan

⁴ Ade Heryana, 'Policy Brief: Pengertian, Fungsi, dan Efektivitas' (Academia.edu, 2020) 4
<https://www.academia.edu> diakses 10 Mei 2025.

dengan cara membuatnya berdampak. Beberapa hal strategis yang dapat dilakukan adalah, dengan melakukan audiensi kepada berbagai pihak baik dari sisi masyarakat maupun dari sisi pemerintah. Audiensi penting dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, serta kepentingan yang berbeda-beda dari setiap kelompok yang terdampak dari kebijakan tersebut, agar dapat dilakukan analisis pemecahan masalah yang solutif.

Policy brief juga harus menentukan objek masalah yang tepat, dimana isu yang diangkat haruslah penting, memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sistemik, dan memiliki dampak nyata bagi masyarakat, dengan membawa objek masalah yang tepat akan meningkatkan peluang agar rekomendasi yang disampaikan mendapat perhatian dan respons dari para pembuat kebijakan. Untuk memperkuat data dan dasar analisis maka diperlukan keterlibatan berbagai pihak melalui sesi diskusi terbuka ataupun jajak pendapat kepada berbagai pihak terkait seperti pejabat pemerintah, kementerian terkait, akademisi, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat umum, hal ini menjadi langkah yang penting dalam mengumpulkan berbagai perspektif yang akan menciptakan berbagai sudut pandang beragam terkait masalah tersebut, sehingga pada akhirnya *policy brief* yang dihasilkan bersifat inklusif dan berdampak bagi banyak pihak.

D. PENUTUP

Penyusunan *policy brief* merupakan keterampilan penting yang harus dikuasai oleh mahasiswa hukum dan calon analis kebijakan, terutama dalam menghadapi tantangan dunia hukum dan kebijakan publik yang semakin kompleks. Melalui *policy brief*, seseorang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menyusun argumen, merumuskan solusi, dan memberikan rekomendasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan pada tingkat strategis. Oleh karena itu, penting untuk memahami bahwa sebuah *policy brief* yang baik harus disusun secara sistematis, berbasis data, ringkas, namun tetap substantif dan persuasif.

Kegiatan *ALSA Legal Writing Intensive Training x ALSA Study Club #2* yang mengangkat tema “Mastering Policy Brief: Writing for Impactful Recommendations” memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kapasitas peserta dalam memahami dan mempraktikkan teknik penyusunan *policy brief*. Mulai dari pengenalan struktur dasar, teknik analisis kebijakan, hingga strategi komunikasi tertulis yang efektif, semua aspek ini

menjadi bekal yang berharga dalam proses advokasi maupun penyampaian pendapat hukum kepada pemangku kebijakan.

Dalam praktiknya, *policy brief* memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan antara dunia akademik dan pembuat kebijakan. Mahasiswa hukum tidak hanya dituntut untuk memahami norma hukum secara tekstual, tetapi juga ditantang untuk mampu menerjemahkan prinsip-prinsip hukum tersebut ke dalam rekomendasi kebijakan yang berdampak dan aplikatif. Oleh karena itu, kemampuan menyusun *policy brief* harus terus diasah melalui pelatihan, diskusi ilmiah, dan keterlibatan langsung dalam isu-isu publik yang relevan.

Dengan memperkuat keterampilan menulis *policy brief*, mahasiswa dapat berperan aktif dalam mewujudkan kebijakan publik yang tidak hanya legal secara formal, tetapi juga adil, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Harapannya, kegiatan ini dapat menjadi awal dari tumbuhnya generasi muda yang kritis, solutif, dan berintegritas dalam menyuarakan perubahan melalui instrumen-instrumen kebijakan yang strategis dan berlandaskan pada nilai-nilai keilmuan serta kemanfaatan sosial.

E. DAFTAR PUSTAKA

- D Wahyudi, 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Cyber Crime di Indonesia' (2013) *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* 99–100
- J Widodo, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik* (S Wahyudi, Y Setyorini and I Basuki eds, Media Nusa Creative 2021) 20–22
- V Septiandika, I Sucahyo, A Rahmadi and N Fitria, 'Seminar dan Pelatihan Pada Mahasiswa Terkait Identifikasi Isu Kebijakan dan Penyusunan Policy Brief' (2022) 5(1) *Jurnal Cemerlang: Pengabdian Pada Masyarakat* 158
<https://doi.org/10.31540/jpm.v5i1.1891>